

Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Program Bapak Angkat Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Tri Susanto*, Mirsa Diah Novianti, Adi Budipriyanto

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie, Indonesia

E-mail: tri.susanto@bakrie.ac.id*, mirsa.novianti@bakrie.ac.id, adi.budipriyanto@bakrie.ac.id

Received: December 17, 2021 | Revised: February 14, 2022 | Accepted: March 23, 2022

Abstrak

Kegiatan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Bapak Angkat ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan SOP Program Bapak Angkat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, serta meningkatkan pemahaman terkait teori, prinsip, dan teknik penyusunan SOP sesuai dengan peraturan pemerintah. SOP adalah sebuah buku petunjuk yang sifatnya tertulis. Peserta kegiatan ini berasal dari 5 perguruan tinggi swasta di Jakarta dan salah satunya adalah Universitas Bakrie yang bersama dengan Dinas PPKUKM aktif mengikuti acara sosialisasi pengembangan SOP pada bulan Maret 2021 dengan menggunakan metode pendampingan. Kegiatan penyusunan SOP Pengembangan Program Bapak Angkat dimulai dengan kegiatan menyusun dan mengumpulkan bahan, setelah itu bahan atau materi kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Program Bapak Angkat merupakan program kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil – menengah dan pembahasan SOP dengan unit kerja Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Anggota tim dari Teknik Industri Universitas Bakrie memberikan supervisi dan arahan kepada Dinas PPKUKM DKI Jakarta dalam penyusunan SOP Pengembangan Program Bapak Angkat.

Kata kunci: Kemitraan; Program Bapak Angkat; Standar Operasional Prosedur; Usaha Kecil-Menengah

Abstract

This assistance activity in the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) of Foster Father's Program a community service activity that aims to produce a draft SOP of Foster Father's Program at the Industry and Trade Office of Small and Medium Enterprise Cooperatives (PPKUKM) of DKI Jakarta Province, as well as improving understanding related to the theory, principles, and techniques for preparing SOP in accordance with government regulations. A SOP is a written manual. Participants of this activity came from 5 private universities in Jakarta and one of them was Bakrie University which together with the PPKUKM Office actively participated in the SOP development socialization event in March 2021 using mentoring methods. The activity of preparing the SOP for the Development of Foster Father's Program begins with the

activity of compiling and collecting materials, after which the material or material activities, then continued by formulating the Operational Standard of The Development Procedure of Development Foster Father's Program.

Keywords: *Foster Father's; Partnerschaft; Small-Medium Enterprise; Standard Operating Procedure*

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja yang mengacu pada prosedur baku (Rasul, 2008), atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam hal ini di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat menyelenggarakan dan perdagangan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi untuk melakukan tindakan solusi. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan publik Dinas PPKUKM akan terus meningkat.

Sumber Daya Manusia terdiri atas daya pikir serta daya fisik pada setiap individu, atau lebih jelasnya merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia ditentukan oleh daya pikir (Sidabutar, 2020), serta daya fisiknya. Sumber Daya Manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Walaupun adanya peralatan yang canggih tanpa adanya Sumber Daya Manusia maka hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Karena daya pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian didapatkan dari usaha (belajar dan pelatihan).

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan industri kecil adalah melalui program kemitraan antara perusahaan umum milik negara dengan industri kecil yang dikenal juga dengan Program Bapak Angkat. Sistem ini dilakukan dengan mengharuskan perusahaan besar milik negara untuk memberikan bantuan pada perusahaan kecil. Diantara bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan modal, pemasaran, konsultasi, penelitian dan pengembangan (Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1993).

Untuk mewujudkan proses Program Bapak Angkat yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses

Program Bapak Angkat tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Dinas PPKUKM. SOP ini menjelaskan setiap tahapan Program Bapak Angkat yang harus dilakukan, hak dan tanggung jawab, kewenangan masing-masing pihak, serta siapa saja yang terlibat.

SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan dapat dipergunakan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Asbeni dkk. (2013), SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

Dengan adanya Program Bapak Angkat akan memperoleh bekal pengetahuan yang cukup untuk dapat mengembangkan usaha dalam skala industri atau perdagangan sehingga dapat memenuhi selera pasar yang setiap saat selalu berkembang, dan pelaku usaha agar dapat terus berinovasi dengan memanfaatkan bahan baku lokal, diversifikasi bahan baku sebagai substitusi impor dan sekaligus dapat meningkatkan nilai jual dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia cukup banyak. Pembinaan sumber daya manusia memang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus, karena dinamika usaha, selera pihak yang dilayani, permintaan pasar sangat cepat berubah (Nuraeni, 2010).

Jika dilihat dari penjabaran tentang manfaat SOP pengembangan UKM melalui Program Bapak Angkat bisa disimpulkan bahwa manfaat SOP sangat signifikan dan SOP Program Bapak Angkat harus ada dalam Dinas PPKUKM DKI Jakarta dijalankan oleh pimpinan dan juga staf dinas tersebut. Dinas yang mempunyai SOP tapi tidak menjalankan sesuai yang tertera di SOP ibarat kapal yang berjalan tanpa navigasi sehingga hasil atau tujuan yang tercapai bisa berbeda dengan tujuan yang ditetapkan di awal.

Program ini mewajibkan seluruh perusahaan milik negara untuk menjadi “Bapak” dari perusahaan kecil yang diangkat sebagai “Anak”. Program ini dilandasi oleh konsep kekeluargaan yang hidup dalam budaya Indonesia. Suatu hal yang menarik dari sistem ini adalah bentuk hubungan yang tidak semata-mata dilandasi oleh perhitungan ekonomi seperti halnya dalam sistem subkontrak (*subcontracting*) maupun bentuk hubungan keterkaitan perusahaan kecil-besar lainnya. Pada sistem subkontrak seperti yang dipraktikkan oleh negara Jepang, Korea, Singapura dan Malaysia.

Dampak dari program Program Bapak Angkat adalah terjadinya pengembangan wirausaha kecil – menengah pembinaan perusahaan besar (Erizal, 2011) milik negara melalui kerja sama atau kemitraan diberikan pada pengusaha kecil menengah yang telah menjalankan usaha satu tahun atau lebih, memiliki sarana produksi terbatas, memiliki produk dan masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan dalam rangka memperkuat kelembagaan usaha, meningkatkan kemampuan produksi serta memperluas akses sumber daya manusia (Sudaryanto dkk., 2013) .

Wirausaha baru yaitu pengusaha kecil-menengah merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia didampingi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) dikalangan masyarakat (Wahyudi, 2018), dengan keterlibatan partisipasi pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha masyarakat serta sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan usaha kecil agar mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan nasional.

Demikian juga dengan hasil penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Program Bapak Angkat ini memerlukan kepakaran terutama dari bidang identifikasi peta kerja permasalahan kemitraan Program Bapak Angkat beserta alur kegiatannya sehingga didapat keseragaman kegiatan, konsistensi, minimal kesalahan dan perlindungan pekerja (Maulidya, 2019).

Selain itu, kepakaran diperlukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja dalam pengembangan Program Bapak Angkat. Untuk membantu penyusunan SOP pengembangan Program Bapak Angkat, kepakaran dari Prodi Teknik Industri Universitas Bakrie memberikan sumbangsih kepakarannya pada program pengabdian masyarakat.

Dilihat dari bentuk bantuan yang harus diberikan, terlihat besarnya fungsi dan tanggung jawab yang harus dimainkan oleh Program Bapak Angkat. Maka untuk itu keberhasilan program juga tergantung pula pada ada tidaknya Program Bapak Angkat memiliki kemahiran sebagai konsultan, tata kerja dan prosedur yang jelas yang menghendaki kesiapan sumber daya manusia, organisasi maupun dana.

Metodologi

SOP menurut pandangan Tambunan (2020), merupakan pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistematis.

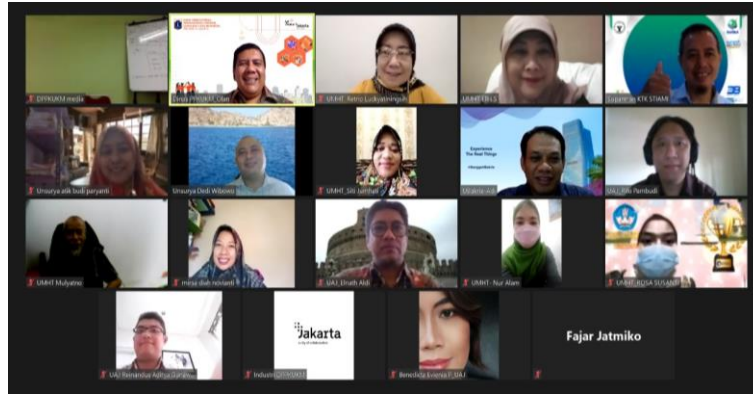
Dengan memberikan pemahaman terkait teori, prinsip dan teknik penyusunan SOP Pengembangan Program Bapak Angkat dari usaha besar pada usaha kecil menengah Dinas PPKUKM, serta dapat menghasilkan Draft Standar Operasional Prosedur Pengembangan Program Bapak Angkat, yang dapat menjalin mitra-mitra kerja sama antara usaha besar dengan usaha kecil menengah dengan difasilitasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

Target pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk Program Bapak Angkat dengan merangkum sebanyak 11 kegiatan beserta kelengkapan dan *output*. Adapun pelaksanaan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur Program Bapak Angkat di Dinas PPKUKM diawali dengan studi pendahuluan. Kegiatan yang dilakukan setelah mengetahui hasil studi pendahuluan adalah melakukan perencanaan kegiatan pendampingan penyusunan SOP Program Bapak Angkat. Kegiatan perencanaan terdiri dari pembuatan lembar catatan lapangan dan pembuatan format SOP. Sasaran peserta pendampingan dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1. Peserta Pendampingan Penyusunan SOP Dosen PTS Jakarta dengan Dinas PPKUKM

Kegiatan	Kelembagaan	Sasaran Peserta yang Berpartisipasi
Pedampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Bapak Angkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta	Perguruan Tinggi Swasta Jakarta yang mengikuti Pendampingan penyusunan SOP Program Bapak Angkat

Selain itu, penentuan tanggal pelaksanaan pendampingan penyusunan SOP dan pembuatan undangan kepada pemberi materi/narasumber dan tenaga pendukung juga dilakukan pada tahap perencanaan ini. Salah satu rapat penyusunan SOP Bapak Angka antara Dinas PPKUKM dan dosen PTS di Jakarta dapat diamati pada Gambar 1.



Gambar 1. Rapat Penyusunan SOP Bapak Angkat Dinas PPKUKM dan Dosen PTS Jakarta

Catatan lapangan digunakan untuk mendapatkan data deskriptif pelaksanaan pendampingan penyusunan SOP Program Bapak Angkat. Sedangkan format SOP yang akan dibuat oleh manajemen ketenagaan adalah sebagai berikut: definisi operasional, tujuan prosedur, luas lingkup prosedur dan penggunaannya, prosedur, alur program bapak angkat, dan kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur.

Bapak-Anak Angkat (BAA) dengan berpedoman pada konsep tersebut di atas, pemerintah mengembangkan suatu kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk memajukan industri-industri di Indonesia. Kebijaksanaan untuk itu dituangkan pada program Bapak-Anak Angkat, yaitu dimulai sejak Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983.

Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar BUMN dan BUMS untuk berperan aktif ikut mengembangkan industri kecil melalui program keterkaitan ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Perindustrian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 301/M/SK/8/1984, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Departemen Perindustrian bertugas untuk mempromosikan program keterkaitan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil melalui hubungan *subcontracting* dan hubungan Bapak-Anak Angkat.

Hubungan *subcontracting* adalah hubungan antara BUMN atau perusahaan besar lainnya dengan perusahaan kecil dalam bentuk pemesanan suku cadang atau komponen (*part*) produksi akhir. Sedangkan hubungan Bapak-Anak Angkat (BAA) adalah bentuk pengembangan pengusaha kecil oleh perusahaan besar melalui hubungan mitra dagang, atau sebagai pemasok kebutuhan operasional pengusaha besar.

Bentuk-bentuk bantuan pengusaha besar kepada pengusaha kecil tidak dibatasi dalam bentuk mitra dagang saja, tetapi bisa juga di dalam bentuk pembinaan yang lain. Program

keterkaitan antara Pengusaha Besar dengan Pengusaha Kecil dan Menengah ini menjadi lebih penting setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, 1984). Sejak dikeluarkannya UU ini, maka berarti pola keterkaitan sudah dinyatakan sebagai pola umum perindustrian di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dinas PPKUKM DKI Jakarta berinisiatif membentuk kemitraan antara BUMN dengan Usaha Kecil Menengah dalam Program Bapak Angkat. Agar terjalin hubungan yang saling membutuhkan, maka Dinas PPKUKM menginventarisasi keberadaan dari Usaha Kecil Menengah dari segi produk yang dihasilkan, jangkauan pemasarannya, kemampuan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian mengundang instansi terkait (BUMN) untuk dimintakan kesediaannya menjadi mitra atau Program Bapak Angkat dari UKM yang terkait dengan bidang usahanya dan bila terjadi kesesuaian maka dibuatkan MOU kemitraan antara BUMN dengan UKM dalam program Program Bapak Angkat. Dan pada Tabel 2 berikut dapat diamati program kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil – menengah terbagi dalam 11 kegiatan, yang dimulai dari kegiatan inisiatif dari Suku Dinas/Kasatpel dalam mencari usaha besar sebagai Program Bapak Angkat yang akan disandingkan (bermitra) dengan usaha kecil - menengah.

Dengan kelengkapan *database* mitra kerja sama antara usaha besar dengan usaha kecil - menengah. Sedangkan *output* yang dihasilkan dalam pencarian ini berupa identitas usaha besar beserta spesifikasinya sebagai Program Bapak Angkat dan identitas usaha kecil - menengah sebagai Anak Angkat yang akan menjalin kemitraan dalam berusaha.

Pengaturan *Monitoring Output*

Untuk menjamin agar kegiatan dapat menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan (*quantity* dan *quality*) maka proses *monitoring* yang akan dilakukan adalah dengan cara:

1. *Monitoring* proses pelaksanaan dalam bentuk pengamatan guna memastikan konsistensi implementasi dengan penyusunan SOP Program Bapak Angkat.
2. Melakukan *review draft* penyusunan pendampingan SOP Bimbingan Teknis peserta pada saat pendampingan berlangsung.
3. *Review* laporan akhir kegiatan.

Tabel 2. Tahapan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Program Bapak Angkat

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Output					
		Dinas DPPKUKM	Suku Dinas	Kepala Bidang	Biro kerjasama	Pihak ke-3							
1	Inisiatif dari sukudinas untuk mencari Program Bapak Angkat/ mitra						Database mitra kerjasama	Nama & spesifikasi mitra					
2	Menugaskan pelaksanaan koordinasi untuk kerjasama						Proses Penugasan					Disposisi	Disposisi disampaikan
3	Menyusun rencana koordinasi kerjasama (kemitraan/ Program Bapak Angkat)									Prosea Penyusunan		Konsep rencana kegiatan	Konsep rencana siap dikerjakan
4	Melakukan pemeriksaan (jika setuju melaporkan kepada Kadinas, jika tidak mengembalikan)								Keputusan Pemeriksaan			Laporan evaluasi hasil monev	Laporan evaluasi hasil monev dengan paraf Koordinator
5	Biro kerjasama daerah mengajukan mou surat kuasa ke gubernur kadinas utk menandatangani										Pegajuan MOU	Konsep rencana kegiatan	Konsep rencana kegiatan kerjasama (Bapak Angkat)
6	Mengundang instansi terkait dan pihak-3										Undang Instansi terkait	Undangan rapat	Undangan sampai tepat waktu
7	Mengadakan rapat terbatas pra MOU (kemitraan/ Program Bapak Angkat)							Rapat Suku Dinas	Rapat dgn Kepala Bidang	Rapat dgn Biro Kerjasama	Rapat dgn Pihak 3	Ruang rapat, ATK, Konsep kegiatan, contoh produk	Rumusan Rapat
8	Mengundang pihak terkait (pihak-3 & UKM)						Undang Dinas PPKUKM				Undang Pihak 3	Undangan, Konsep kegiatan	Undangan sampai tepat waktu
9	Pelaksanaan MOU antara Kepala Dinas dan pihak-3 disaksikan Kasudin dan Ka Kerjasama						Melaksanakan MOU dgn Dinas PPKUKM	Melaksanakan MOU dgn Suku Dinas		Melaksanakan MOU dgn Biro Kerjasama	Melaksanakan MOU dgn Pihak 3	Dokumen MOU, Kamera, Contoh produk	MOU ditandatangani bersama
10	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan							Menyusun Laporan				Dokumen kerjasama dan alat pendukung	Laporan tersusun dan disampaikan pada Kadis
11	Laporan hasil evaluasi kegiatan kerjasama (Program Bapak Angkat)											Dokumen hasil evaluasi kegiatan kerjasama	Laporan hasil evaluasi kegiatan kerjasama

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan yang dilaksanakan pada awal bulan April hingga 30 April yang melibatkan 5 perguruan tinggi di Jakarta dan pihak yang terkait dari Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah petunjuk buku yang sifatnya tertulis. Kegiatan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Program Bapak Angkat dimulai bulan Maret 2021 dengan kegiatan menyusun dan mengumpulkan bahan, setelah itu penelaahan bahan atau materi kegiatan.

Dilanjutkan dengan merumuskan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Program Bapak Angkat dan pembahasan SOP dengan unit kerja Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Anggota tim dari Prodi Teknik Industri Universitas Bakrie memberikan supervisi dan arahan kepada Dinas PPKUKM DKI Jakarta dalam penyusunan SOP Pengembangan Program Bapak Angkat.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan penyusunan SOP dilaksanakan dengan tiga langkah yaitu: studi pendahuluan, perencanaan, dan pelaksanaan. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa Dinas PPKUKM telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Program Bapak Angkat dan diperlukan pembaharuan. Perencanaan pelaksanaan pendampingan penyusunan SOP dilakukan dengan membuat catatan lapangan kegiatan pendampingan dan penyusunan format SOP.

SOP Pengembangan Program Bapak Angkat terdiri dari 11 kegiatan, dimana setiap kegiatan menghasilkan *output* masing-masing. Sedangkan pelaksanaan pendampingan penyusunan SOP dilakukan dengan enam tahap yaitu tahap persiapan, pembentukan tim pelaksana, perencanaan, penyusunan, uji coba *draft* SOP, dan implementasi SOP. SOP tersebut dibutuhkan untuk mengatur penjaminan mutu hasil Program Bapak Angkat.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada LPkM Universitas Bakrie, DPPUKM DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan *paper* Pendampingan Penyusunan SOP Pengembangan Program Bapak Angkat.

Daftar Pustaka

- Asbeni, Tihardi, A., & Rusdiono. (2013). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 1(01), 1–19.
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. (1993). *Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi/KUD*. Jakarta.
- Erizal, Y. (2011). *Analisa Pelaksanaan Kemitraan Anak Angkat Bapak Angkat (ABA) dalam Usaha Agribisnis Kelapa Sawit di PT. GMP Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat* [Skripsi]. Universitas Andalas, Padang.
- Maulidya, S. (2019). *Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) di PT. Pupuk Kujang* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nuraeni, Y. (2010). Perancangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Manusia. *Journal of Information Systems*, 6(1), 32–43.
- Rasul, S. (2008). Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), 52-67.
- Sidabutar, V. T. P. (2020). Kajian Penerapan Corporate University dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 255-270.
- Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2013). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Tambunan, I. B. (2020). Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemesanan Makanan Di Prime Steak House Fine Dining Restoran JW Marriott Hotel Medan. *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung*, 7(2), 50-57.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 *Tentang Perindustrian*. 29 Juni 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22. Jakarta.
- Wahyudi, A. (2018). Edupreneurship sebagai Strategi Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Timur Menghadapi MEA. *Accounting and Management Journal*, 1(1), 55-62.